



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HERNAN MAHARDHIKA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 103224

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 875.000.000

1. Tanah Seluas 3970 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/86 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 14.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2008, WARISAN Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 78.232.800

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 148.242.170

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.115.474.970

**III. HUTANG** Rp. 273.704.611

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 841.770.359

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUDHARMONO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **197363**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 470.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/65 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 100.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 1.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 9.150.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 580.150.000****III. HUTANG****Rp. ---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 580.150.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LAZUARDI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 808466

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	101.000.000
1. MOTOR, HONDA NF125 TRF SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, HONDA BLADE 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V AT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	12.360.077
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	113.360.077
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	423.602.105
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-310.242.028

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RASMAN
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 758044

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 325.476.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m<sup>2</sup>/11 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 135.476.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m<sup>2</sup>/10 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m<sup>2</sup>/10 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 72.913.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.113.000
2. MOTOR, HONDA NF125 TR M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.800.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 300.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 94.095.500

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 492.784.500

**III. HUTANG** Rp. 34.086.381

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 458.698.119

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUHANA
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 511743

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m <sup>2</sup> /29 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	----
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	39.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	10.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	299.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	59.664.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	239.336.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.